

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Panggung sejarah dunia di dekade terakhir millennium kedua telah diisi dengan episode yang mengandung ironi. Dikatakan demikian, karena pada tahun-tahun di penghujung abad ke-20 lalu, bukan hanya telah terjadi kebangkitan demokrasi secara global melainkan juga kebangkitan nasionalisme yang bercampur baur dengan konflik etnis. Dalam satu dekade terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20, sifat konflik memang mengalami perubahan drastis. Salah satu perubahan yang paling dramatis adalah pergeseran dari konflik antarnegara menuju konflik dalam negara. Konflik-konflik yang paling kejam sepanjang awal dan pertengahan abad ke-20 adalah konflik antarnegara, tetapi pada tahun 1990-an hampir semua konflik besar di dunia terjadi di dalam negara.¹ Jika kita mengamati perkembangan konflik yang terjadi di dalam negara beberapa tahun terakhir ini justru didominasi oleh konflik-konflik nasionalis, meliputi perselisihan antara kelompok yang didasarkan pada kesamaan identitas etnis, rasial, agama, dan kelompok berbahasa sama yang merasa dirinya sebagai bangsa. Identifikasi kelompok yang unik dan bersifat memaksa ini ternyata dalam perkembangannya cenderung menghasilkan konflik satu sama lainnya.

Konflik yang terjadi dalam sebuah negara dengan latarbelakang perselisihan etnis selanjutnya disebut sebagai konflik etno-nasionalisme dapat didefinisikan sebagai konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan dirinya dengan menggunakan kriteria

¹ Peter Harris dan Ben Reilly (Eds), 2000, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar*. Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, Jakarta: IDEA, hlm. 1.

komunal dan mengemukakan tuntutan-tuntutan atas nama kepentingan kolektif kelompoknya terhadap negara, atau terhadap aktor komunal lainnya. Konflik etnis melibatkan gerakan-gerakan 'irredentist' (pencaplokan), 'seccesionist' (pemisahan), atau anti kolonial. Konflik etno-nasionalis didasarkan pada tiga kriteria, yaitu: (1) konflik itu terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara; (2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pemerintah yang sedang berkuasa; dan (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus. Konflik etno-nasionalisme yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai 'kekerasan komunal' (*communal violence*) dan perang internal wilayah².

Kini konflik etno-nasionalisme telah menjadi fenomena yang meluas, telah banyak contoh konflik etno-nasionalis yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II, antara lain; di Sri Lanka, India, Pakistan, Kanada, Irlandia dan sejumlah negara lainnya. Dalam perkembangannya konflik etno-nasionalisme yang terjadi dewasa ini ternyata tidak hanya tumbuh di lingkup negara-negara berkembang, otoriter, atau yang demokrasinya belum mapan, seperti yang di pahami selama ini. Kenyataan membuktikan bahwa persoalan nasionalisme tidak menutup kemungkinan juga muncul di lingkungan negara yang ekonominya maju dan demokrasinya telah stabil. Fenomena konflik nasionalis di sejumlah negara tersebut merupakan gambaran dari perkembangan nasionalisme khususnya yang berkaitan dengan nasionalisme etnis dalam studi hubungan internasional. Kehadiran nasionalisme selanjutnya menjadi berkah bagi masyarakat lokal sekaligus masalah bagi kekuasaan universal. Bagi masyarakat lokal nasionalisme bisa berarti jalan menuju kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri. Sebaliknya, bagi

² El Fatih A. Abdel Salam, Kerangka Teroritis Penyelesaian Konflik; International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia ([http:// www.yahoo.com/](http://www.yahoo.com/)). Hlm. 1.

status quo nasionalisme adalah sesuatu yang membahayakan karena lebih dipandang sebagai gerakan pemberontak.

Meskipun isu yang terkait dengan persoalan nasionalisme dan etnisitas bukan fenomena baru dalam kepustakaan Politik dan Ilmu Sosial lainnya, tetapi dengan menguatnya identitas dan tuntutan *self-determination* dari berbagai kelompok etnis di beberapa negara semakin menempatkan persoalan ini sebagai isu kontemporer yang menarik perhatian, terlebih lagi isu-isu seputar konflik etno-nasionalisme tersebut kemudian melahirkan gerakan perlawanan terhadap pemerintahan yang berdaulat. Tuntutan gerakan perlawanan yang ekstrem seperti keinginan pemisahan wilayah untuk membentuk sebuah negara tersendiri tidak mustahil berpotensi memicu terjadinya perang saudara yang tidak jarang berakhir pada perpecahan dan pertempuran berdarah.

Melihat fenomena konflik etno-nasionalisme yang erat kaitannya dengan gerakan separatis di era globalisasi ini selanjutnya menarik minat penulis untuk mengangkat tema tersebut sebagai objek kajian, karena menurut asumsi penulis hal ini tentu tidak serta merta terjadi, melainkan ada serangkaian sejarah yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan antara etnis tersebut. Menurut penulis banyak faktor yang mendorong sebuah gerakan nasionalisme etnis menjadi sumber utama pemicu konflik di sebuah negara-bangsa, diantaranya karena adanya ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang berakibat munculnya gerakan perlawanan; adanya kebutuhan primordial dan universal seperti pengakuan identitas dari salah satu kelompok etnis yang mendorong mereka berjuang untuk memisahkan diri dari negara inti. Seringkali dalam proses pencapaian tujuan perjuangannya gerakan ini tidak dapat dipisahkan dari konflik bersenjata.

Eksistensi gerakan perlawanan yang terjadi di sejumlah negara, serta fenomena konflik yang mungkin ditimbulkannya kemudian menjadi penting dalam kajian studi hubungan internasional kontemporer dimana gerakan separatis etnis ternyata berpotensi menjadi sumber konflik yang sangat hebat bagi sebuah negara-bangsa dengan kecendrungan memicu perang saudara. Bertitik tolak dari keinginan penulis untuk menemukan proses perkembangan sebuah gerakan nasionalisme etnis di sebuah negara dan faktor-faktor yang mendorong gerakan tersebut menjadi pemicu perang yang potensial membuat penulis merasa tertarik membahas lebih dalam tentang kemunculan gerakan militansi dalam konteks etno-nasionalis di Sri Lanka dalam kaitannya dengan gerakan separatis Macan Tamil Eelam.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguak bagaimana gerakan etno-nasionalis selanjutnya beakselerasi menjadi gerakan militansi di dalam sebuah negara-bangsa dengan studi kasus Organisasi Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE) di Sri Lanka.

C. Latar Belakang Masalah

Menyitir hasil penelitian Osawa, kurang lebih 90 % negara-negara dewasa ini adalah *multination-state*. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 50 negara adalah *multination-state* yang memiliki satu atau lebih kelompok etnis "bermasalah".³ Disebut "bermasalah" karena memiliki aspirasi nasionalisme. Meskipun mereka telah berasimilasi

³ Juan Osawa.1997. "National Identity and Ethnic-Religious Conflicts: Some Statistical Correlations." *Asia Pasific Review*. Vol.4 No .1. Spring /Summer.hlm.126.

cukup lama dengan penduduk-penduduk lainnya, banyak diantara mereka yang masih merasa terpisah dan berbeda. Rasa berbeda ini pada akhirnya berpotensi melahirkan gerakan separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk sebuah negara tersendiri, atau tidak jauh dari bentuk ekstrem ini, sebatas otonomi internal yang terbebas dari pengaturan negara induknya. Tuntutan gerakan separatis ini biasanya ditolak oleh pemerintah pusat karena dianggap mengancam integritas politik dan teritorial negara. Tidak mustahil pula konflik diantara tuntutan separatis yang tersembunyi menjelma menjadi bom waktu yang setiap saat siap meledak, sehingga seringkali hal ini menjadi penyebab perang yang potensial.

Sri Lanka adalah salah satu dari sekian banyak negara yang mengalami persoalan pelik terkait dengan gerakan separatis. Konflik nasionalis yang terjadi di dalam negara ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah perselisihan antara dua kelompok etnis inti di Sri Lanka yaitu antara kelompok Suku Sinhala dan Tamil yang sudah berlangsung sejak Sri Lanka meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sejak sekitar tahun 550 SM Sri Lanka dihuni oleh kaum pendatang dari daratan India yaitu etnis Sinhala yang membangun kota suci Anuradhapura dan menjadikan Sri Lanka sebagai pusat pengajaran agama Buddha. Pada abad ke-3 SM terjadi migrasi suku Tamil beragama Hindu, yang berlangsung selama 1000 tahun. Pada masa itu pihak Tamil menjadi penyerang yang gencar, mereka menguasai bagian utara pulau Sri Lanka yang akhirnya mendesak suku Sinhala makin ke Selatan ada juga yang terpaksa mengungsi ke gunung dan mendirikan kerajaan mereka sendiri.

Sebelum silih berganti dikuasai bangsa-bangsa Barat, mulai dari Bangsa Portugis pada tahun 1505, Belanda dan kemudian Inggris, di pulau itu sudah berdiri dua kerajaan

besar yang bedaulat yaitu Kandy dan Kotte disebelah Selatan yang dikuasai oleh orang Sinhala dan Jaffna disebelah Utara yang merupakan kubu Tamil. Sejak tahun 1815, Inggris menjadi kekuatan Barat pertama yang berhasil menguasai seluruh pulau dalam wilayah kekuasaan Britania Raya sekaligus sebagai penjajah terakhir yang datang ke Sri Lanka. Penjajahan Inggris telah mengubah citra sosial dan ekonomi Sri Lanka menjadi masyarakat yang berorientasi pada hasil bumi. Hasil bumi utama dari Sri Lanka adalah kopi, karet, dan teh. Pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga pemetik kopi, daun teh dan penyadap karet, Inggris mendatangkan orang-orang Tamil India, akibatnya populasi suku Tamil meningkat pesat sehingga akhirnya Sri Lanka kini dihuni oleh tiga suku India yang berbeda yaitu kaum Sinhala, kaum Tamil Sri Lanka, dan kaum Tamil India.⁴

Dalam masa penjajahannya di Sri Lanka, Inggris membuat garis perbatasan administratif, ekonomis, dan politis sesuai dengan kebiasaan di negara-negara Barat seperti London dan Perancis. Namun dalam penarikan garis tersebut mereka cenderung mengabaikan garis pemisah antar suku dan etnis. Mengabaikan kenyataan adanya dua bangsa yang berbeda, dengan alasan demi memudahkan pengelolaan. Inggris bahkan meletakkan begitu saja dua kerajaan itu di bawah satu pemerintahan penjajahan yang sama, akibatnya perselisihan antar suku tidak dapat terelakan. Persaingan sosial, ekonomi, dan budaya diantara kedua suku pribumi ini pada akhirnya berujung pada konflik sosial politik. Konflik Tamil-Sinhala segera merebak setelah Inggris memerdekakan Ceylon pada tahun 1948. Pasalnya, Inggris menyerahkan kekuasaan seluruh pulau itu kepada pemerintahan etnis Sinhala, yang berpusat di Colombo, yang

⁴ Tuti Nuriyah Erwin, *Asia selatan dalam Sejarah*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: hlm.135-136.

kemudian mengganti nama pulau itu menjadi Sri Lanka sekaligus menetapkan agama Budha sebagai agama negara dan bahasa Sinhala dijadikan satu-satunya bahasa resmi di Sri Lanka.⁵

Hal ini tentu saja memicu kemarahan disisi etnis Tamil, mereka merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua. Bagi etnis Tamil, kemerdekaan dari Inggris hanya mengawali babak baru penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Sinhala. Penindasan bangsa Sinhala terhadap warga Tamil langsung terjadi setelah hengkangnya bangsa Inggris. Dengan berbagai cara pemerintahan Colombo menolak mengakui keberadaan etnis Tamil sebagai sebuah bangsa atau suku bangsa. Berbagai aturan hukum yang mendiskriminasikan warga Tamil pun diberlakukan. Angkatan Bersenjata Sri Lanka yang hampir semua anggotanya adalah orang Sinhala, kemudian juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi dan pembantaian besar-besaran terhadap warga Tamil.⁶ Ditengah kekecewaan yang mendalam kaum Tamil tidak tinggal diam, para politisi Tamil sepakat membentuk front perlawanan untuk memperjuangkan sebuah negara Tamil yang merdeka dan terpisah dari Sri Lanka. Sebagian dari mereka berjuang lewat jalur konstitusional di parlemen, tetapi sebagian lagi memilih jalur perjuangan bersenjata.

Diantara sekian banyak kelompok pembebasan yang didirikan oleh kaum Tamil, diantaranya ada lima kelompok yang ekstrem yaitu :

1. Organisasi Pembebasan Macan Tamil Eelam (Liberetion Tigers of Tamil Eelam / LTTE) yang berdiri pada tahun 1976, dibawah pimpinan Velupillai Prabhakaran dengan tujuan utama mendirikan negara Tamil yang merdeka & berdaulat di

⁵ Mulyawan Karim, Sri lanka : Kebencian Berbuah Kehancuran, Kompas, Minggu 10 September 2006. hlm. 6.

⁶ *Ibid*

sebelah timur laut Sri Lanka. Meskipun pada awalnya hanya beranggotakan 30 orang kelompok ini merupakan wujud nyata gerakan separatis yang terus melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Colombo, hingga saat ini.

2. Front Pembebasan Kesatuan Tamil (TULF) didirikan pada tahun 1977, secara resmi front ini berhasil menduduki 14 kursi parlemen di propinsi Utara dan 12 kursi di propinsi selatan. TULF ini menuntut otonomi Tamil di wilayah Jaffna. Pemimpinnya Amisthalingham hijrah ke Madras, India Selatan di negara bagian Tamil Nadu dan melatih ± 3.300 gerilyawan TULF yang sangat berbahaya.
3. Front Pembebasan Revolusioner Rakyat Eelam (EPRLF) didirikan tahun 1970 oleh gerakan mahasiswa Tamil. Mereka lebih intelektual, berideologi, dan mempunyai hubungan dengan PLO.
4. Organisasi Revolusioner Eelam (EROS) merupakan kelompok kecil yang berhubungan dengan PLO.
5. Organisasi Pembebasan Rakyat Tamil Eelam (PLOT) dibawah pimpinan Uma Maheswaran memiliki kerjasama dengan kaum kiri suku Sinhala, ideologinya mengikuti revolusi komunis. Markas dan pusatnya di Tamil Nadu dengan organisasi yang penuh kerahasiaan.⁷

Dari lima kelompok eksterm diatas LTTE adalah gerakan perlawanan etnis paling aktif yang dalam beberapa tahun terakhir ini bertanggung jawab terhadap sejumlah peristiwa pembunuhan dan peledakan yang terjadi di Sri Lanka. LTTE pula yang memicu pecahnya perang saudara ketika sejumlah gerilyawannya melancarkan serangan kesebuah

⁷Tuti Nuriah Erwin *op cit*, hlm.137-138.

markas militer, yang mengakibatkan tewasnya 13 tentara Sri Lanka pada tahun 1983. Insiden ini memicu merebaknya kerusuhan anti-Tamil, yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan warga Tamil. Perang terbuka kemudian pecah di wilayah Tamil di utara, antara pasukan pemerintah dengan gerilyawan LTTE. Sejak saat itu pula kaum separatis Tamil dengan front pembebasannya mulai aktif kembali, mereka mulai mendirikan kamp-kamp militer di Tamil Nadu, India Selatan dan mendidik para pemuda Tamil untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Karena bentuk pergerakan LTTE yang identik dengan perjuangan bersenjata (militan), maka konflik separatis dan etnis yang terjadi di Sri Lanka dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari konflik bersenjata dimana tuntutan teritorial dan politik militan yang terorganisir atas dasar prinsip-prinsip identitas etnis telah berkembang menjadi perselisihan nasionalis dan etnis yang mengarah pada perang saudara.

Perselisihan etnis yang terjadi di Sri Lanka antara LTTE yang mewakili etnis Tamil dengan pemerintah Sri Lanka yang notabene adalah orang Sinhala selama ini seringkali berujung pada pertumpahan darah yang banyak menimbulkan korban baik harta benda maupun jiwa manusia, seperti peristiwa 5 Juni 1985 dimana kaum Sinhala menyerang perkampungan Tamil di Triyayi. Peristiwa itu terjadi pada saat orang-orang turun ke ladang dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Ketika itu dua unit helikopter tentara terbang rendah tanpa peringatan dan aba-aba, helikopter memuntahkan senapan mesiu dari udara sehingga membuat warga Triyayi panik dan segera mencari tempat berlindung. Pasukan infantri lengkap dengan senjata menghancurkan bangunan sekolah, kantor, dan yang membuat sakit hati masyarakat Tamil yaitu hancurnya kuil Hindu, patung Wisnu dan Siwa. Kelompok militer Tamil segera melakukan pembalasan

dendam dengan kekejaman tanpa akhir, pembantaian sadis dilakukan kaum separatis Tamil di Trikomalee yang dihuni petani miskin Sinhala, orang Tamil memberondong penduduk dan membakar rumah mereka yang tengah bersiap merayakan hari lahirnya sang Buddha. Peristiwa ini mengakibatkan kematian ratusan jiwa dari kedua belah pihak. Setelah pembantaian Trikomlee, sebuah bom meledak dari mobil yang diparkir di sebuah Bank of Cylon Colombo diperkirakan 106 orang tewas dan yang lain luka-luka, pihak LTTE mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.⁸

Pemberontakan demi pemberontakan yang berakhir dengan kontak senjata terus berlangsung di Sri Lanka. Berbagai upaya damai telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik etnik tersebut melalui proses perundingan antara kedua belah pihak. Salah satu yang berakhir pada kesepakatan gencatan senjata adalah perjanjian damai pada Februari tahun 2002. Namun, krisis berkepanjangan tersebut belum serta merta berakhir. Prasangka dan rasa saling tidak percaya masih terus menyelimuti hubungan antara pemerintah Colombo dan warga minoritas Tamil yang diwakili oleh LTTE. Sinar perdamaian yang sudah mulai menyala dinegara berpenduduk 19,4 juta jiwa ini kini kian meredup dengan pecahnya konflik bersenjata pada 10 September 2006 saat pasukan gerilyawan menyerang penjagaan terdepan pasukan Sri Lanka di daerah Muhamalai di sepanjang semenanjung Jaffna yang menewaskan 28 tentara Sri Lanka dan 125 orang luka-luka, selanjutnya pemerintah Colombo melancarkan serangan balasan dengan membombardir daerah-daerah di Sri Lanka bagian timur yang merupakan basis gerilyawan Tamil, akibatnya diperkirakan 130 anggota gerilyawan Tamil terbunuh dan 8000 warga sipil terjebak karena terputusnya akses jalan.⁹ Rakyat Sri Lanka kini bahkan

⁸ *Ibid*, hlm.140.

⁹ Kompas, edisi 11 September 2006.

terancam kemungkinan segera dimulainya secara resmi perang saudara babak kedua, yang tidak seorang pun dapat memastikan kapan perang tersebut akan berakhir.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat adanya kecendrungan upaya penguatan identitas dan tuntutan *self-determination* dari salah satu etnis inti di Sri Lanka yaitu etnis Tamil yang mengancam stabilitas & integritas nasional maupun global. Dimana dalam proses pencapaian tujuannya mereka menerapkan langkah-langkah militan dengan membentuk LTTE sebagai organisasi perlawanan terhadap etnis yang bersebrangan dengan mereka. Gerakan separatis yang diprakarsai oleh LTTE dengan tujuan menciptakan negara Tamil merdeka, selanjutnya justru mengarah pada gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, akibatnya justru memicu terjadinya konflik bersenjata yang berakhir pada perang saudara antara Etnis Tamil dan Sinhala.

Fenomena konflik etnis di Sri Lanka yang diwakili oleh LTTE dan pemerintah Colombo menjadi objek yang penting dan relevan untuk dikaji, dimana keberadaan LTTE ternyata berpotensi menjadi sumber konflik yang hebat bagi Sri Lanka dengan kecendrungan memicu terjadinya perang saudara. Disamping itu persoalan konflik nasionalisme etnis saat ini tidak hanya menjadi permasalahan nasional melainkan telah menjadi kecendrungan global. Dalam waktu yang tidak terlalu lama jejak gerakan separatis seperti LTTE diperkirakan akan diikuti oleh kelompok-kelompok sejenis di negara yang berbeda. Tentunya ini menjadi permasalahan baru bagi dunia politik internasional dimasa yang akan datang, karena beberapa konflik etno-nasional yang terjadi dalam sebuah negara tidak mustahil dapat meluas secara internasional. Hal ini merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan domestik sekaligus dunia terutama jika perjuangan gerakan etnis tersebut dipengaruhi oleh faktor internasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil suatu persoalan yang cukup menarik untuk diteliti yaitu :

”Mengapa muncul gerakan militansi Macan Tamil Eelam dalam konteks etno-nasionalis di Sri Lanka?”

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk dapat menjawab serta menguraikan persoalan diatas, maka sesuai dengan aturan penulisan ilmiah digunakan konsep dan teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah **konsep Etno-nasionalisme (*Ethno-nationalism*)** dan **Teori Deprivasi Relatif (*relative deprivation*)**.

1. Konsep Etno-nasionalisme

Fred W. Riggs, salah seorang sarjana yang pertama kali memberi label nasionalisme etnis/etno-nasionalisme (*ethno-nationalism*) terhadap upaya penentuan nasib sendiri atau perjuangan untuk memperoleh kedaulatan yang menggunakan identitas etnis sebagai dasar klaimnya. Ia mempelopori penggunaan istilah ini secara luas dalam rangka membedakannya dengan jenis nasionalisme yang telah kita kenal selama ini, yang oleh Riggs di sebut sebagai *state-nationalism*.¹⁰ Nasionalisme etnis (*ethno-nasionalism*) diartikan sebagai sentimen dari anggota-anggota suatu *ethnonation* yang dimobilisasi untuk memperjuangkan kedaulatan bagi komunitas etnis mereka. Sementara, *ethnonation* diartikan sebagai komunitas orang yang memaknakan identitas politik mereka dengan

¹⁰ Edwin Martua Bangun Tambunan, *Nasionalisme etnik Kashmir dan Quebec*. Intra Pustaka Utama. hlm. 1.

mengklaim hak untuk menjalankan kedaulatan.¹¹ Konsep etno-nasionalisme ini idealnya digunakan untuk mencermati pergeseran konflik yang terjadi dalam politik internasional dewasa ini. Apabila sebelumnya dunia didominasi oleh konflik antar negara dan selanjutnya bergeser menuju konflik dalam negara dimana sebagian besar dari konflik dalam negara ini didorong oleh pencarian dan penentuan nasib sendiri atau pengakuan akan identitas komunal dari salah satu kelompok masyarakat dalam sebuah negara.

Konsep etno-nasionalisme, menurut Umberto Melloti, merujuk pada tipe khusus nasionalisme dan terkait dengan warga negara yang masih memimpikan kemerdekaan. Hingga saat ini gerakan-gerakan etno-nasionalisme telah tersebar di sejumlah negara, salah satunya adalah Sri Lanka. Konsep etno-nasionalisme sendiri mengandung benih disintegrasi, dimana kerangka keutuhan suatu bangsa dilepaskan satu per satu. Dalam konteks ini, etno-nasionalisme tampil sebagai jeritan perlawanan terhadap ancaman dari luar. Perjuangan-perjuangan untuk *self-determination* dan pembentukan negara terpisah ini selanjutnya dapat dianggap sebagai mobilisasi etnisitas dalam suatu bangsa.

Perkembangan etno-nasionalisme ini ternyata menimbulkan ketakutan, kecemasan dan kecurigaan dalam kehidupan bersama sebagai suatu masyarakat majemuk. Keamanan dan kedamaian menjadi sesuatu yang sukar diraih, karena keragaman etnisitas acap kali dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang secara *de facto* memiliki kepentingan politik terselubung. Pergesekan dan pertikaian antar etnis yang terjadi di Indonesia, Rwanda, India, Sri Lanka dan sejumlah negara multietnik lainnya membuktikan disharmoni dalam masyarakat multietnik. Kesadaran dasar akan sisi negatif etno-nasionalisme ini selanjutnya menyediakan ruang pengolahan etno-nasionalisme yang berperan penting dalam bidang politik domestik dan internasional.

¹¹ *Ibid.* hlm.10.

Istilah etno-nasionalisme tentunya tidak dapat kita pisahkan dari konsep dasar yang membangunnya yaitu nasionalisme (*nationalism*) dan etnisitas (*ethnicity*). Secara garis besar ada tiga perspektif tentang nasionalisme yang nantinya akan menuntun kita memahami proses perkembangan dari bentuk *state nationalism* menuju kearah etno-nasionalisme yang terjadi dewasa ini. Ketiga perspektif itu adalah; Perspektif primordial, kontekstual dan konstruktif. Perspektif primordial memandang bangsa sebagai sesuatu yang *ancient* dan *immemorial*, karena bangsa memiliki karakter demikian. Perspektif ini berpendapat bahwa nasionalisme bersifat kontinyu, dengan kata lain nasionalisme yang kita temukan saat ini merupakan kelanjutan dari semangat kebangsaan yang telah berkembang jauh sebelumnya. Perspektif ini juga menyatakan akar dari nasionalisme adalah elemen-elemen yang membentuk sebuah bangsa. Elemen-elemen ini terbagi dua. *Pertama* elemen *tangible*, yaitu identitas, kedalam unsur ini termasuk: bahasa, agama, teritorial. *Kedua*, elemen *intangibile*. Elemen ini bersifat psikologis, berupa ikatan emosional yang terbentuk dari pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai bersama.

Mengikuti penjelasan perspektif primordial, nasionalisme yang berkembang saat ini merupakan kelanjutan dari upaya kelompok etnis untuk membentuk bangsa berdasarkan dua macam elemen tersebut. Perspektif ini menjelaskan bahwa nasionalisme berkembang melalui suatu proses yang disebut *self-contained cultural process*, yang prosesnya kurang lebih sama dengan pewarisan. Dalam proses ini ide tentang bangsa dan nasionalisme diwariskan secara turun-temurun, dengan cara mengartikulasikan sentimen kebangsaan terus menerus dengan memanfaatkan medium *printed-language*, sastra, agama nasional, dan pendidikan. Meskipun penjelasan perspektif ini cukup mudah diterima, perspektif ini memiliki kelemahan mendasar. Primordialisme tidak memberi

penjelasan bagaimana identitas dan unsur psikologis yang dimiliki kelompok etnis akhirnya berkembang menjadi etno-nasionalisme. Kelemahan ini menyebabkan perspektif primordial tidak dapat menjelaskan mengapa kelompok etnis yang memiliki unsur identitas dan psikologis tidak seluruhnya memiliki nasionalisme, juga tidak menjelaskan mengapa kelompok etnis yang semula berkehendak membentuk bangsa, dalam evolusinya kehilangan nasionalisme.

Kelemahan ini disebabkan perspektif primordial mengabaikan dua unsur penting dari perkembangan modern, yaitu (1) kompetisi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong menguatnya identitas dan *emotional appeal* dari suatu kelompok etnis, dan (2) adanya aktor yang menggerakkan anggota kelompok etnis sehingga memiliki sentimen kebangsaan. Dua unsur ini yang nantinya menjadi tema sentral dari perspektif selanjutnya.

Menurut perspektif kontekstual, nasionalisme dalam kelompok etnis tidak terbentuk secara *natural*. Ia tidak hanya terbentuk karena elemen-elemen primordial. Nasionalisme tumbuh dan berkembang karena kelompok etnis menghadapi ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini antara lain: pengabaian, eksploitasi, dominasi, kolonialisasi internal, represi, diskriminasi atau aneksasi. Penjelasan perspektif kontekstual di atas banyak dipakai para sarjana Ilmu Sosial dekade 1970-an. Penjelasan yang diberikan perspektif ini dianggap bisa menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh perspektif sebelumnya. Namun, meski mendapat sambutan yang cukup luas, perspektif ini juga menuai sejumlah kritik. Sorotan pertama datang dari perspektif primordial. Walker Connor, misalnya, mengkritik perspektif kontekstual bersifat determinis karena terlalu menonjolkan aspek ekonomi. Padahal

ungkap Connor, faktor ekonomi berdampak maksimal hanya pada dua situasi. Pertama, dalam situasi di mana unit ekonomi prinsipil berhimpitan dengan *ethnonation*. Kedua, dalam situasi di mana kelas sosio-ekonomi berhimpitan dengan *ethnonation*.

Kritik yang kedua datang dari perspektif konstruktif. Sorotan mereka terutama di tujukan pada ketidakmampuan perspektif kontekstual menjelaskan mengapa tidak semua kelompok etnis yang mengalami ketidakadilan memiliki semangat kebangsaan. Menurut perspektif konstruktif, nasionalisme adalah fenomena tradisional sekaligus modern. Baik unsur primordial maupun perkembangan kontemporer mempengaruhi pembentukannya. Sama seperti perspektif kontekstual, perspektif konstruktif beranggapan nasionalisme tidak terbentuk dengan sendirinya. Namun, berbeda dengan perspektif kontekstual, perspektif konstruktif memandang nasionalisme tidak terbentuk begitu saja hanya karena kelompok etnis menghadapi ketidakadilan. Dalam pandangan perspektif ini etno-nasionalisme terbentuk karena ada pihak yang merekonstruksinya. Nasionalisme terbentuk karena para nasionalis melakukan rekayasa sosial dengan memanfaatkan warisan primordial (*invented traditions*) serta *setting* politik, ekonomi, sosial, dan budaya kontemporer yang mereka hadapi.¹²

Dalam rekayasa sosial ini ada dua faktor yang berperan, yaitu pemimpin atau kepemimpinan dan organisasi untuk memobilisasi massa. Unsur pimpinan atau kepemimpinan penting karena upaya kelompok etnis memperjuangkan status kebangsaannya tidak akan berjalan selama tidak ada *person* yang menggerakkan dan mengarahkannya. Unsur organisasi penting karena diperlukan sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan kelompok. Perspektif konstruktif berperan dalam melengkapi bagian penjelasan yang lowong dalam dua perspektif sebelumnya. Namun

¹² *Ibid* .hlm.4-5.

peran ini, tidak membuat perspektif konstruktif lolos dari kritik. Perspektif ini dinilai terlalu mekanistik dan elitis, menganggap proses sosial semuanya berlangsung secara teratur dan dikendalikan dari atas. Perspektif ini dianggap menamfikkan proses sosial yang bersifat spontan.

Etno-nasionalisme terkadang merupakan tanggapan spontan dari anggota kelompok etnis, bukan sebuah politisasi yang direncanakan. Connor memberi contoh ekspresi etno-nasionalisme Assam yang diwujudkan dalam bentuk pembunuhan massal atas warga keturunan Bengal. Menurut Connor, kita tidak dapat menjelaskan peristiwa ini dengan perspektif konstruktif, karena tidak ada satupun pemimpin atau organisasi yang berada dibalik peristiwa tersebut, semuanya berlangsung spontan.¹³ Setidaknya ada tiga kesimpulan yang kita dapatkan dari pandangan di atas. *Pertama*, setiap etno-nasionalisme tidak terlepas dari *primordial attachment*. Penjelasan teoritik dan kritik sebagaimana yang dikemukakan bagian sebelumnya menunjukkan unsur primordial dipastikan selalu tampil dalam setiap etno-nasionalisme, baik sekedar sebagai *maker* atau sebagai sumber etno-nasionalisme.

Kedua, meski semua bermula dari *primordial attachment*, terkonsolidasinya kelompok etnis kedalam suatu etno-nasionalisme tidak hanya didasarkan pada faktor primordial semata. Namun juga dibutuhkan faktor-faktor lainnya sebagaimana dijelaskan perspektif kontekstual dan konstruktif. *Ketiga*, baik perspektif primordial, kontekstual maupun konstruktif ternyata kurang memperhatikan satu faktor yang mewarnai perkembangan etno-nasionalisme dewasa ini, yaitu faktor internasional. Tiga perspektif ini memandang persoalan etno-nasionalisme hanya pada *level* domestik. Padahal dorongan untuk memperjuangkan etno-nasionalisme saat ini, selain bersumber dari

¹³ Walker. Connor, *Ethnonationalism: The Quest for Understanding*, Princeton University Press. hlm142.

faktor-faktor domestik suatu negara dan faktor-faktor internasional kelompok etnis, juga dipengaruhi oleh dua faktor lainnya.

Kedua faktor tersebut meliputi sejauh mana aktor-aktor internasional memberi perhatian dan pengakuan terhadap perjuangan kelompok etnis. Dalam faktor ini termasuk, (1) dukungan dari pemerintah atau kelompok masyarakat di negara lain yang timbul karena adanya *affective link* berupa afinitas historis dan religius; (2) dukungan secara tidak langsung dari kekuatan regional yang menilai persoalan yang melanda kelompok etnis harus diselesaikan secepatnya agar instabilitas kawasan dapat dihindari; (3) simpati dari organisasi-organisasi internasional atau jaringan internasional berupa dukungan moril karena perjuangan kelompok etnis dinilai dalam rangka menegakan HAM, atau berupa bantuan material atau *media coverage*. (4) dukungan dari negara-negara besar yang timbul karena negara-negara tersebut memiliki agenda-agenda politik dan ekonomi tertentu terhadap pemerintah negara di mana kelompok etnis itu berada. Faktor selanjutnya adalah sejauh mana lingkungan internasional kondusif bagi perjuangan mereka. Dalam faktor ini termasuk struktur sistem internasional dan isu internasional yang terbentuk dari struktur tersebut.

Berdasarkan kerangka diatas dapat dilihat empat komponen analisa untuk mengidentifikasi sumber-sumber ethno-nasionalisme. Yang pertama adalah sumber primordial yang meliputi: bahasa, agama, teritorial, nilai, keyakinan, dan pengalaman bersama. Sumber kedua adalah konteks politik, ekonomi dan sosial kontemporer. Melalui sumber kedua ini dapat ditelusuri ada atau tidaknya diskriminasi atau ketidakadilan yang dialami kelompok etnis dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga adalah sumber konstruktif untuk melacak apakah tumbuhnya etno-nasionalisme juga didorong

oleh proses politik (politisasi) tertentu. Sumber ini digunakan untuk menelusuri peran para elit maupun organisasi-organisasi yang dimiliki kelompok etnis dalam menumbuhkan etno-nasionalisme. Sebagai sumber keempat adalah faktor internasional. Sumber ini dipakai untuk melacak peran faktor-faktor eksternal dalam mendorong tumbuhnya etno-nasionalisme.

Dari keempat komponen analisis ini nantinya komponen kedua dan keempat akan penulis gunakan untuk meneliti penyebab terjadinya gerakan perlawanan yang merupakan salah satu efek dari perkembangan etno-nasionalisme di sejumlah negara, khususnya Sri Lanka yang menjadi objek kajian dari penelitian ini. Munculnya perlawanan etnis Tamil terhadap etnis Sinhala yang diwujudkan dalam gerakan Macan Tamil Eelam merupakan refleksi dari perkembangan etno-nasionalisme di negara tersebut. Organisasi Macan Tamil Eelam merupakan gerakan perlawanan etnis dalam bentuk separatis, dimana kelompok nasionalis ini hendak berjuang melepaskan diri dari negara induknya untuk membentuk sebuah negara baru yang merdeka yang mereka sebut negara Tamil. Seperti layaknya gerakan separatis lainnya perjuangan kelompok ini mendapat tantangan keras dari pemerintah, karena dinilai akan mengancam integritas politik dan wilayah Sri Lanka. Namun, hal ini justru memicu perlawanan mereka menjadi lebih ekstrem dengan menerapkan pola perjuangan bersenjata yang tidak dapat dilepaskan dari aksi teror, penyerangan dan pembunuhan berdarah.

Konflik yang terjadi antara pihak Tamil dan Sinhala ini selanjutnya diidentifikasi sebagai konflik etno-nasionalisme pada akhirnya berubah menjadi perang saudara yang berlarut-larut dan mengorbankan banyak harta dan jiwa dari kedua belah pihak, serta berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, regional maupun global.

2. Teori Deprivasi Relatif (*relative deprivation*)

Teori deprivasi relatif pada awalnya dipakai untuk menjelaskan penyebab terjadinya gerakan sosial, tetapi oleh para analis studi Ilmu Hubungan Internasional teori ini dipakai sebagai rujukan untuk menjelaskan berkembangnya nasionalisme-etnis. Ted Robert Gurr, merupakan salah seorang pakar yang berjasa mengangkat teori ini, ia menjelaskan timbulnya *relative deprivation* dengan mengartikannya sebagai diskrepansi yang dipersepsikan berlangsung antara harapan tentang nilai (*value expectetations*) dan kapabilitas untuk memperoleh nilai (*value capabilities*). Menurut Gurr, *relative deprivation* akan timbul apabila "meningkatnya intensitas harapan tentang nilai tidak dibarengi dengan meningkatnya kapabilitas untuk memperoleh nilai, atau turunnya kapabilitas untuk memperoleh nilai tidak diikuti dengan turunnya harapan tentang nilai". *Relative deprivation*, ungkap Gurr, menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat, ketidakpuasan ini apabila dipolitisasi akan melahirkan sebuah gerakan sosial.¹⁴

Sedangkan menurut pakar lainnya, Walter.S.Jones dalam bukunya Logika Hubungan Internasional menjelaskan tentang deprivasi relatif (*relative deprivation*), yang menegaskan bahwa "pemberontakan politik dan pembangkangan lainnya terjadi bila rakyat merasa apa yang mereka terima kurang dari semestinya". Berdasarkan definisi tersebut maka teori kerugian relatif sangat bermanfaat untuk menjelaskan sebab-sebab perang nasional yang dilatarbelakangi oleh ketidak puasaan domestik yang semakin besar dari sebuah kelompok dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membuat mereka bangkit untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau demi menebus kekecewaannya. Namun dalam proses pencapaian perolehan tersebut kelompok yang bersangkutan

¹⁴ Ted Robert Gurr. 197. *Why Men Rebel*. hlm. 12-13.

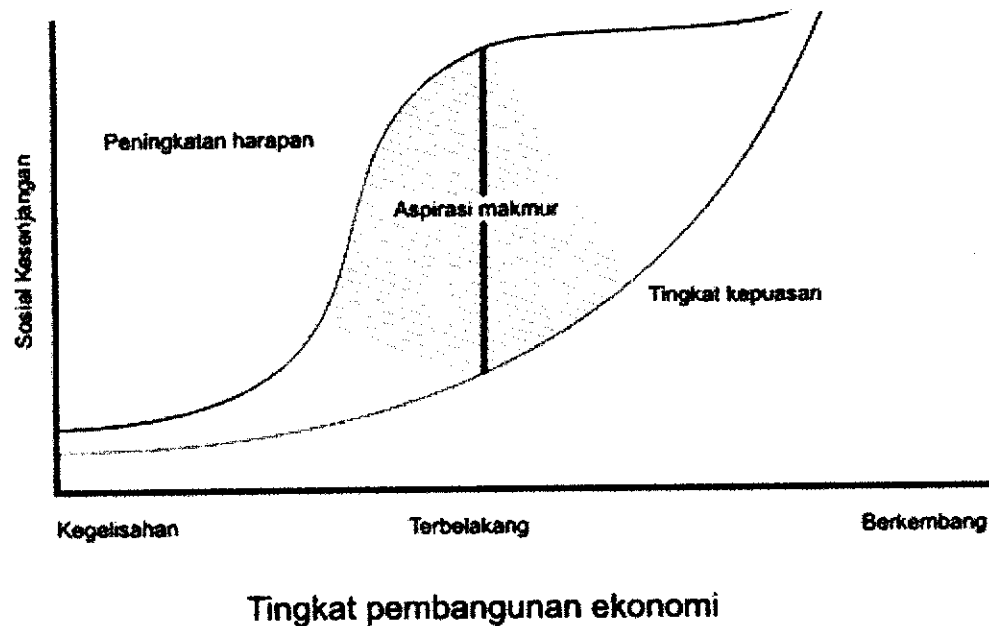
cenderung mengambil langkah agresi dan kekerasan politik.¹⁵ Ada satu hal penting yang membedakan gagasan ini dari alasan penyebab perang lainnya, yakni kondisi kemiskinan dan penindasan yang absolut tidak praktis menjadi penyebab berkobarnya semangat pemberontakan, melainkan tanggapan subjektif atau psikologis atas kondisi-kondisi itulah yang selanjutnya menjadi faktor pemicu lahirnya gerakan pemberontakan.

Berbagai studi tentang pemberontakan dan gerakan revolusi mendapati, bahwa kekerasan paling sering terjadi justru pada saat berbagai kondisi yang ada dalam sebuah negara mulai mengalami perbaikan, bukan pada saat berbagai kondisi tersebut berada pada titik yang terburuk. Proses awal perbaikan setelah sekian lama berada pada situasi yang tertekan selanjutnya melahirkan semangat revolusi untuk mencapai suatu peningkatan harapan. Akan tetapi ternyata apa yang menjadi harapan tumbuh lebih cepat dibandingkan kenyataan, sehingga terciptalah kesenjangan aspirasi dimana ketidakpuasan yang memuncak lama-kelamaan terakumulasi dan menyuburkan ekstrimisme ideologi dan eksklusionisme rasial. Studi statistik yang dilakukan secara cermat menemukan bahwa frekuensi kekerasan cenderung mengalami peningkatan selama masa transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Hal ini membuktikan ramalan teori penyebab perang yang terkait dengan konsep kerugian relatif bahwa ada korelasi yang erat antara konflik kekerasan dengan tingkatan absolut keterbelakangan ekonomi di sebuah negara.¹⁶ Dengan kata lain konflik dapat muncul ketika ada kesenjangan aktual atau ketidakadilan yang dirasakan dalam proses distribusi keuntungan.

¹⁵ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia*. Vol 2. hlm. 202.

¹⁶ *Ibid.*.

Kurva 1.1. Tingkat pembangunan ekonomi: kesenjangan aspirasi dan potensi pemberontakan (arsir).



Konsep kerugian relatif sangat ideal untuk menjelaskan perbedaan yang besar atas tingkat kekerasan yang terjadi di negara berkembang dengan frekuensi kekerasan yang berlangsung di negara-negara maju. Jika ditinjau secara historis, sejak berakhirnya perang dunia ke II tepatnya pada tahun 1945, perang saudara lebih banyak terjadi di negara berkembang daripada di negara-negara maju. Antara 1945-1948 berlangsung delapan puluh lima perang dari berbagai tingkatannya di negara Dunia Ketiga, seperti Korea, Vietnam, Nigeria, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia dan Sudan beberapa diantaranya berlangsung sangat sengit serta menimbulkan kerusakan dan korban yang mencapai

puluhan, ratusan ribu bahkan jutaan jiwa.¹⁷ Sedangkan sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di negara-negara maju, yakni Kanada, Irlandia Utara, Prancis dan Belgia hanya pada taraf kekacauan sporadis yang berlangsung di wilayah mereka sendiri, jumlah korban yang dipublikasikanpun hanya mencapai ribuan jiwa.

Konflik etno-nasionalis yang terjadi di negara-negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang belum stabil semakin memperparah kemiskinan di negara-negara ini. Konflik etno-nasionalis tersebut secara perlahan menghancurkan basis-basis ekonomi negara yang memang sebelumnya telah rapuh, akibatnya menimbulkan penderitaan tanpa akhir bagi rakyatnya dari generasi ke generasi. Persoalan kesenjangan ekonomi dan sosial tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari peranan pemerintah yang berkuasa di setiap negara yang terlibat konflik nasional. Keberadaan pemerintah oleh kelompok minoritas yang merasa tidak terpuaskan aspirasi ekonomi, sosial dan budayanya dinilai otoriter, tidak kompeten, lemah dan parokial, kemudian menjadi cikal bakal persaingan diantara kedua belah pihak. Bagi para analis yang mengambil pandangan dengan orientasi pemerintah sebagai sumber konflik kontemporer, persoalan ini merupakan sektor kunci, karena keluhan sosial dan ekonomi ini pada akhirnya akan dinyatakan dalam bentuk politik dengan menciptakan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang notabene didominasi oleh kelompok mayoritas.

Tiga pola utama dapat dilihat dari fenomena ini. *Pertama*, konflik dapat menjadi sesuatu yang bersifat endemik, bahkan dalam negara berbasis demokrasi liberal sekalipun, ketika partai politik menjadi berbasis askriptif dan satu komunitas merasakan bahwa kekuasaan negara telah "dikuasai" oleh komunitas lain secara permanen, dan karenanya terdorong untuk menantang legitimasi negara agar dapat mengubah situasi,

¹⁷ Ibid. hlm. 203.

seperti yang terjadi di Kanada, Belgia, Spanyol atau Irlandia Utara. Ini juga menjadi ciri dalam sejumlah negara bukan Barat, seperti Sri Lanka. *Kedua*, Tampaknya konflik di negara-negara di mana rezim otoriter berhasil memanipulasi perangkat negara agar dapat mempertahankan kekuasaan dan membendung akses politik bagi mereka yang bukan bagian dari jaringan kelompok rezim, pada akhirnya akan menjadi bersifat "kleptokrasi" yang eksploitatif. Di sini, politik benar-benar menjadi *zero-sum* dan perubahan hanya dapat dihasilkan melalui tantangan langsung terhadap rezim yang berkuasa. *Ketiga*, muncul fenomena yang sedang tumbuh dari negara-negara yang "gagal" atau "runtuh" yang dengan tidak adanya sarana yang memadai untuk meningkatkan pendapatan atau menjaga ketertiban, mengalah pada kekerasan endemik dan kekerasan yang mengakibatkan kekacauan.¹⁸

F. Hipotesa

Berdasarkan akar permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut :

1. Ketidakpuasan yang terakumulasi atas diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami etnis Tamil melahirkan gerakan pemberontakan yang menimbulkan kekerasan politik.
2. Dukungan internasional baik dari kekuatan regional India serta kelompok etnis Tamil di negara lain yang timbul karena *affective link* berupa afinitas historis dan religius mendorong aspirasi etno-nasionalis Tamil berakselerasi menjadi gerakan militansi Macan Tamil Eelam.

¹⁸ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse, Resolusi Damai Konflik Kontemporer: "Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras". Hlm.135.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah *library research*, maka data yang diambil dan dijadikan sumber penelitian adalah data sekunder. Bahan yang dijadikan rujukan adalah buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel koran, dan internet yang memiliki keterkaitan tema dengan konflik etno-nasionalis dan Gerakan Militansi Macan Tamil Eelam di Sri Lanka.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini dibatasi pada persoalan bagaimana etno-nasionalisme yang dimiliki oleh etnis Tamil kemudian berakselerasi menjadi gerakan militansi yang menimbulkan konflik nasional berlarut-larut di Sri Lanka. Adapun jangkauan waktu penelitian adalah dengan mengkaji awal mula munculnya perselisihan antara suku Sinhala dan Tamil paska kemerdekaan Sri Lanka dari kolonial Inggris pada tahun 1948 hingga berlangsungnya konflik bersenjata antara kedua belah pihak sejak akhir Juli 2006.

I. Kerangka Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam kerangka penulisan karya ilmiah, dan dibagi dalam bab per bab, dengan pembahasan dalam wilayahnya tersendiri namun masih saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini di bagi dalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

- B. Tujuan Penelitian
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Teori
 - 1. Konsep Etno-nasionalisme
 - 2. Teori Deprivasi Relatif
- F. Hipotesa
- G. Tehnik Pengumpulan Data
- H. Jangkauan Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM SRI LANKA

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Alam
 - 2. Sejarah Etnis
 - 3. Demografi
 - 4. Sistem Pemerintahan dan Politik
 - 5. Perekonomian Sri Lanka
- B. Tinjauan Historis
 - 1. Sri Lanka Pada Masa Kolonialisme Barat
 - 2. Perubahan Sosial, Ekonomi dan Politik Sri Lanka Pasca Kolonialisasi Inggris

**BAB III AKSELERASI ASPIRASI ETNO NASIONALIS TAMIL DALAM
BENTUK GERAKAN PEMBEBASAN MACAN TAMIL EELAM**

- A. Perkembangan Etno-nasionalis di Sri Lanka
- B. Akar Penyebab Konflik dalam konteks Etno-nasionalis di Sri Lanka
- C. Persolan Rasial di Sri Lanka
- D. Gerakan Pembebasan Macan Tamil Eelam Sebagai Perwujudan
Aspirasi Separatisme Etnis Minoritas Tamil

**BAB IV MUNCULNYA GERAKAN MILITANSI MACAN TAMIL EELAM
DALAM KONTEKS ETNO-NASIONALIS DI SRI LANKA**

- A. Kelahiran Gerakan Militansi Nasionalis Macan Tamil Eelam
 - 1. Aktivitas LTTE
 - 2. Area Operasional
 - 3. Kekuatan LTTE
- B. Dukungan Eksternal Bagi Gerakan Militansi Macan Tamil Eelam
 - 1. Jaringan Sporadis Etnis Tamil
 - 2. Intervensi India
- C. Gerakan Macan Tamil Eelam Sebagai Media Perlawanan Etnis Tamil
- D. Tersendatnya Penyelesaian Konflik Nasional di Sri Lanka
- E. Babak Baru Perang Saudara Sri Lanka

BAB V KESIMPULAN